

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kesadaran Lingkungan

Definisi dari kesadaran merujuk pada keadaan di mana seseorang memahami atau mengerti tindakan yang dilakukan serta bertindak secara aktif dan dalam keadaan sadar. Sementara itu, definisi dari lingkungan mengacu pada kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, kondisi, serta makhluk hidup, di mana terdapat interaksi antara sikap dan perilaku yang saling memengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya (Sartika dkk., 2011). Kesadaran lingkungan merupakan konsep yang menggambarkan sejauh mana individu memahami, peduli, dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan serta bersedia untuk bertindak dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dalam teori kesadaran lingkungan oleh Geng dan He (2021), kesadaran lingkungan dapat diartikan sebagai persepsi masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kesadaran ini mencerminkan bagaimana individu menilai kondisi lingkungan dan merespons berbagai persoalan yang berkaitan dengan pencemaran, pengelolaan sampah, hingga upaya pelestarian lingkungan (Geng & He, 2021). Semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap lingkungan, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut terlibat aktif dalam perilaku pro-lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran lingkungan seseorang cukup beragam. Menurut Geng dan He (2021), kesadaran lingkungan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, pengalaman pribadi terkait kerusakan lingkungan, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat (Geng & He, 2021). Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik tentang bahaya pencemaran, cenderung lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dibandingkan seseorang yang kurang terpapar informasi mengenai lingkungan. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan budaya gotong royong atau program pengelolaan sampah yang aktif seperti bank sampah, lebih berpotensi memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi.

Kesadaran lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas program-program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Kesadaran lingkungan juga dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai keberhasilan program lingkungan yang dijalankan pemerintah atau komunitas. Masyarakat dengan kesadaran yang tinggi cenderung lebih kritis dan memiliki ekspektasi lebih terhadap program lingkungan yang diikuti, seperti program pengelolaan sampah. Namun sebaliknya, masyarakat dengan kesadaran rendah cenderung pasif dan kurang memperhatikan manfaat program tersebut, sehingga partisipasinya dapat dikatakan rendah.

Pada teori yang ditetapkan oleh Geng dan He ini disebutkan juga bahwa peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat tidak dapat terjadi secara mandiri. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat

kearah yang lebih baik. Dalam hal ini, regulasi lingkungan menjadi instrumen penting yang dapat memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Regulasi lingkungan yang ditetapkan pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dalam penelitian Geng dan He (2021), regulasi lingkungan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat terkait upaya perlindungan lingkungan. Pada penelitian ini, regulasinya dapat berupa kebijakan, peraturan, serta program lingkungan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, seperti pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, insentif untuk daur ulang, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah. Namun, efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menyadari dan memahami pentingnya kebijakan tersebut serta bagaimana mereka meresponsnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dukungan pemerintah dapat menjadi aspek kunci dalam memastikan bahwa program pengelolaan lingkungan, termasuk bank sampah, dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan dalam memberikan fasilitas pendukung, seperti tempat pengolahan sampah, alat penunjang pemilahan sampah, serta edukasi lingkungan bagi masyarakat (Fitri dkk., 2024). Selain itu, regulasi yang jelas dan tegas mengenai pengelolaan sampah dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program lingkungan yang telah dirancang. Dukungan dalam bentuk kebijakan yang mendukung program bank

sampah, serta sosialisasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat hubungan antara efektivitas program bank sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan.

Selain regulasi dan kebijakan, keberhasilan program pengelolaan lingkungan juga dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat menanggapi dan berpartisipasi dalam program tersebut. Dalam penelitian Geng dan He (2021), ditemukan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi akan lebih proaktif dalam menilai dan mengikuti program lingkungan, termasuk dalam memilah sampah dan mengurangi limbah rumah tangga. Namun, masyarakat yang kurang memiliki kesadaran cenderung tidak aktif dalam program lingkungan, meskipun telah tersedia kebijakan dan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, kombinasi antara efektivitas regulasi lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program bank sampah di berbagai daerah.

Dalam konteks penelitian ini, dukungan pemerintah akan dianalisis sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat hubungan antara efektivitas program bank sampah dengan kesadaran lingkungan masyarakat. Dengan artian, meskipun program bank sampah telah berjalan dengan baik, dampaknya terhadap kesadaran lingkungan masyarakat dapat semakin meningkat apabila didukung oleh regulasi yang jelas, fasilitas yang memadai, serta edukasi yang berkelanjutan dari pemerintah. Namun sebaliknya, jika dukungan pemerintah itu minim, efektivitas program bank sampah mungkin tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kesadaran lingkungan masyarakat.

2.1.2 Teori Politik Lingkungan

Politik lingkungan merupakan pendekatan teoritis yang mempelajari hubungan antara kebijakan publik, aktor politik, dan masyarakat dalam konteks pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. Menurut Verdinand Robertua Siahaan (2020), politik lingkungan tidak hanya berkutat pada isu teknis atau ekologis, melainkan merupakan bagian integral dari proses politik yang melibatkan kekuasaan, kepentingan, nilai, serta struktur institusional. Dalam konteks Indonesia, dasar politik lingkungan dapat ditelusuri dari konstitusi negara, terutama Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Siahaan, 2020).

Definisi Politik lingkungan menurut Tony Djogo, yaitu merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara kebijakan publik, aktor politik, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta perlindungan lingkungan hidup. Politik lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pembuatan aturan, tetapi juga mencakup proses perebutan kekuasaan, pengaruh, dan kepentingan berbagai aktor, baik negara, masyarakat sipil, swasta, maupun organisasi internasional (Djogo, 2014). Peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan sangat penting dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan, terutama dalam menetapkan regulasi dan mengawasi implementasinya. Namun, pemerintah sering kali harus menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan.

Pada konteks politik lingkungan, peran pemerintah sangat sentral sebagai

pengambil kebijakan dan fasilitator dalam pelaksanaan program-program lingkungan, seperti program bank sampah. Politik lingkungan bukan hanya tentang pembuatan aturan, tetapi juga mengenai bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dan didukung oleh elemen-elemen politik dan masyarakat (Siahaan, 2020). Dalam teori ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan, peran lembaga, dan dukungan masyarakat dalam mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam bukunya, Siahaan menyampaikan bahwa model politik lingkungan di Indonesia itu menggabungkan aspek konstitusi, kepemimpinan, dan budaya sebagai pilar utama dalam pengambilan keputusan lingkungan. Konstitusi menjadi dasar hukum, sementara budaya politik dan kepemimpinan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan (Siahaan, 2020). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana dukungan pemerintah dapat memoderasi pengaruh program bank sampah terhadap kesadaran lingkungan masyarakat.

Dalam kerangka politik lingkungan, pendekatan berbasis aktor menjadi salah satu instrumen penting untuk memahami dinamika pengelolaan lingkungan. Menurut Herman Hidayat, pendekatan ini berfokus pada identifikasi peran dan kontribusi berbagai pelaku atau aktor dalam pengelolaan lingkungan, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menganalisis sejauh mana keberadaan dan aktivitas para aktor tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pembangunan berkelanjutan (Hidayat, 2008).

Pemerintah menempati posisi sentral sebagai aktor langsung yang memiliki kewenangan dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan lingkungan. Hal ini ditegaskan pula oleh Herman Hidayat yang membagi aktor dalam politik lingkungan menjadi dua: aktor langsung (negara) dan aktor tidak langsung (LSM, akademisi, lembaga internasional). Negara sebagai aktor langsung tidak hanya memiliki potensi untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab kerusakan lingkungan apabila kebijakan yang diambil tidak memperhatikan aspek keberlanjutan (Hidayat, 2008).

Dalam kerangka tersebut, perspektif ekologis atau ekosentris menjadi pendekatan yang paling relevan dalam teori politik lingkungan. Paradigma ini menekankan bahwa manusia bukan pusat dari dunia moral (seperti dalam antroposentrisme), melainkan bagian integral dari jaringan kehidupan yang saling bergantung. Menurut Keraf (2023) dan Encyclopedia Britannica, paradigma ekosentrisme menempatkan seluruh komunitas ekologis baik biotik (makhluk hidup) maupun abiotik (tanah, air, udara, ekosistem) sebagai objek utama perhatian moral dan etika. Dengan demikian, tanggung jawab manusia bukan hanya terhadap sesama makhluk hidup, tetapi juga terhadap sistem ekologis secara keseluruhan.

Berbeda dengan paradigma antroposentrism, yang memandang alam hanya dari segi manfaatnya bagi manusia, ekosentrisme mengakui bahwa setiap unsur alam memiliki nilai intrinsik nilai yang melekat pada keberadaannya, bukan sekadar karena berguna bagi manusia. Oleh karena itu, paradigma ini menuntut

perubahan cara pandang dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi jangka pendek menuju pengelolaan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan ekologis dalam jangka panjang.

Salah satu bentuk pengembangan paradigma ekosentrisme adalah konsep deep ecology yang diperkenalkan oleh Arne Naess (1973). Deep ecology menekankan bahwa kehidupan manusia dan non-manusia memiliki nilai intrinsik yang sama, keanekaragaman hayati merupakan bagian penting dari keseimbangan ekosistem, dan manusia tidak berhak mengeksplorasi alam kecuali untuk kebutuhan vital. Prinsip ini juga menuntut perubahan gaya hidup agar selaras dengan alam serta lebih mengutamakan kualitas hidup daripada sekadar standar hidup material.

Dalam konteks penelitian ini, perspektif ekosentris sangat relevan karena menempatkan Program Bank Sampah sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya berfungsi mengurangi limbah, tetapi juga menginspirasi perubahan nilai dan perilaku ekologis di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan pengelolaan dan pemilahan sampah, masyarakat belajar bahwa tindakan kecil dalam rumah tangga memiliki dampak besar bagi ekosistem. Dukungan pemerintah berperan penting sebagai penguat dalam kerangka ini melalui regulasi, penyediaan fasilitas, dan sosialisasi berkelanjutan yang mendorong partisipasi masyarakat menjaga keseimbangan lingkungan.

Dengan demikian, sinergi antara kebijakan pemerintah (aktor politik) dan partisipasi masyarakat (aktor sosial) dalam pengelolaan sampah mencerminkan

penerapan nyata dari paradigma ekosentris dalam politik lingkungan, di mana manusia dan lingkungan hidup ditempatkan sebagai dua entitas yang saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Pola Peneliti Terdahulu di Wilayah Perkotaan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah perkotaan, efektivitas program mengenai lingkungan seperti sekolah Adiwiyata telah dikaji untuk melihat pengaruhnya terhadap kesadaran dan karakter peduli lingkungan siswa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Munazilah, Dewi, dan Juwandi (2023) di SMAN 4 Kota Serang yang menunjukkan bahwa program Sekolah Adiwiyata positif atau berpengaruh dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sekolah Adiwiyata memiliki efektivitas sebesar 72%, yang berarti berhasil dalam membentuk sikap peduli lingkungan di kalangan siswa.

Penelitian ini menegaskan bahwa program berbasis lingkungan yang diterapkan di sekolah dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu lingkungan, keterampilan dalam menjaga kebersihan, serta perilaku yang lebih ramah lingkungan. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif siswa dalam berbagai kegiatan yang mendukung kelestarian lingkungan, seperti pemilahan sampah, penghijauan sekolah, serta pengurangan penggunaan plastik sekali pakai (Munazilah dkk., 2023). Namun pada penelitian ini juga, menyoroti bahwa

efektivitas program sangat bergantung pada konsistensi implementasi program, keterlibatan guru dan siswa, serta dukungan dari pemerintah daerah.

Selanjutnya terdapat penelitian di Kota Cimahi, yang dilakukan oleh Lenny Nuraeni, Andrisyah, dan Rita Nurunnisa yang membahas mengenai efektivitas program sekolah ramah anak dalam meningkatkan karakter anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program sekolah ramah anak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan karakter anak usia dini. Hal ini didukung oleh hasil uji regresi yang menunjukkan koefisien positif, serta hasil uji hipotesis yang mengkonfirmasi adanya hubungan yang signifikan antara efektivitas program dan peningkatan karakter anak (Nuraeni dkk., 2019). Penelitian ini menyimpulkan bahwa program ini berhasil meningkatkan karakter anak usia dini, meskipun masih terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi perkembangan karakter anak di luar program tersebut.

Efektivitas program ini diukur berdasarkan tingkat keberhasilannya dalam membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan psikologis serta sosial anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program sekolah ramah anak memberikan kontribusi sebesar 40,9% terhadap perkembangan karakter anak usia dini. Sementara itu, 59,1% perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, seperti peran keluarga, lingkungan sosial, serta metode pembelajaran yang diterapkan di luar program sekolah ramah anak. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun program sekolah ramah anak cukup efektif dalam meningkatkan karakter anak, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada

implementasi program semata. Faktor eksternal seperti dukungan orang tua, interaksi sosial anak, serta metode pengajaran guru di kelas juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan sinergi antara pihak sekolah, keluarga, serta lingkungan sosial anak dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan karakter mereka.

2.2.2 Pola Peneliti Terdahulu di Wilayah Perdesaan

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah pedesaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rita Puspitasari Heryani, Khodijah Ismail, dan Nevrita dengan fokus pada efektivitas adiwiyata terhadap keberlanjutan pembudayaan karakter peduli lingkungan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Bintan. Berdasarkan dari tersebut, efektivitas program Adiwiyata dikaji dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan ekologi. Penelitian ini berfokus pada pembudayaan karakter peduli lingkungan di sekolah-sekolah yang menerapkan program Adiwiyata di Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ini dinyatakan berpengaruh terhadap keberlanjutan pembudayaan karakter peduli lingkungan. Hal ini dipengaruhi oleh aspek sosial seperti partisipasi masyarakat sekolah, aspek ekonomi seperti pemahaman pada dampak ekonominya, serta aspek ekologi yang mencerminkan pemahaman dan perilaku lingkungan warga sekolah.

Pada aspek sosial, indikator partisipasi masyarakat dalam program ini memiliki nilai tertinggi, yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam

kegiatan lingkungan merupakan faktor penting dalam keberlanjutan program. Dari sisi ekonomi, pengembangan karir dan keterampilan berbasis lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong keberlanjutan, sementara dari aspek ekologi, pemahaman mengenai prinsip-prinsip ekologi memiliki peran dominan dalam menentukan efektivitas program Adiwiyata (Puspitasari Heryani dkk., 2024).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa program Adiwiyata di sekolah pedesaan telah memberikan hasil yang positif, tetapi masih terdapat tantangan dalam hal dukungan berkelanjutan dan keterlibatan pihak eksternal. Menurut peneliti tersebut, peningkatan dalam kebijakan lingkungan, pendampingan, serta penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan program ini dapat berjalan dengan lebih optimal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program di wilayah pedesaan bergantung pada sinergi antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Salah satu penelitian di wilayah pedesaan menunjukkan adanya penelitian dengan hasil negatif di suatu program. Hal ini didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syarifuddin mengenai evaluasi program mandiri pangan di Desa Dawuhan, Purwoasri, Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program desa mandiri pangan belum mencapai hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, evaluasi program menunjukkan kategori tidak sesuai dengan skor 130,47 dan persentase 57,99%. Program ini menghadapi beberapa kendala utama, antara lain kurangnya keaktifan anggota, kegagalan

usaha produktif, penyalahgunaan dana pinjaman, serta minimnya pendampingan dari penyuluhan (Syarifuddin, 2016).

Hasil evaluasi program tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program masih berada dalam kategori tidak sesuai, dengan skor keseluruhan 130,47 (57,99%). Secara lebih rinci, program kerja mendapatkan skor 41,51 (69,19%) dan masuk dalam kategori kurang sesuai, karena anggota dan pengurus tidak mampu melaksanakan kegiatan dengan baik. Sumber daya program memperoleh skor 28,91 (57,82%) dan dikategorikan tidak sesuai, akibat ketidakmampuan dalam mengalokasikan modal serta rendahnya keaktifan sumber daya manusia. Pelaksanaan program dinilai sangat tidak sesuai dengan skor 30,84 (51,41%), yang disebabkan oleh minimnya keterlibatan anggota dalam kegiatan serta kegagalan usaha produktif yang dijalankan, baik secara individu maupun kelompok. Sementara itu, keberhasilan program juga masih berada dalam kategori tidak sesuai, dengan skor 29,20 (53,09%), karena belum terbentuknya lembaga pemasaran, tidak adanya perubahan pola konsumsi pangan, serta kurangnya informasi mengenai harga pasar dan jenis komoditas pangan. Secara keseluruhan, rendahnya efektivitas program ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi anggota, ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya, serta lemahnya pendampingan dari pihak penyuluhan, yang menghambat pencapaian tujuan program secara optimal.

2.2.3 Pola Peneliti Terdahulu di Wilayah Luar Negeri

Penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah luar negeri terdapat di Tiongkok dengan penelitian mengenai regulasi lingkungan, kesadaran lingkungan

dan kepuasan tata kelola lingkungan oleh Meng-Meng Geng dan Ling-Yun He. Penelitian tersebut membahas efektivitas regulasi lingkungan dan kesadaran lingkungan terhadap kepuasan masyarakat dalam tata kelola lingkungan di Tiongkok. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi lingkungan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan masyarakat, sementara kesadaran lingkungan justru berpengaruh negatif (Geng & He, 2021).

Dengan begitu, semakin ketat regulasi lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap tata kelola lingkungan. Namun, ketika kesadaran lingkungan masyarakat meningkat, tingkat kepuasan terhadap tata kelola lingkungan justru cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan masalah lingkungan, mereka cenderung kurang puas dengan upaya pemerintah. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat yang lebih sadar memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap kualitas lingkungan dan lebih kritis terhadap kinerja pemerintah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alur berpikir yang sistematis dan logis dalam menganalisis pengaruh efektivitas program bank sampah terhadap kesadaran lingkungan nasabah bank sampah di Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga variabel utama, yaitu efektivitas program bank

sampah sebagai variabel independen (X), kesadaran lingkungan sebagai variabel dependen (Y), dan dukungan pemerintah sebagai variabel moderasi (M). Efektivitas program mengacu pada sejauh mana program bank sampah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, serta keberlanjutan program.

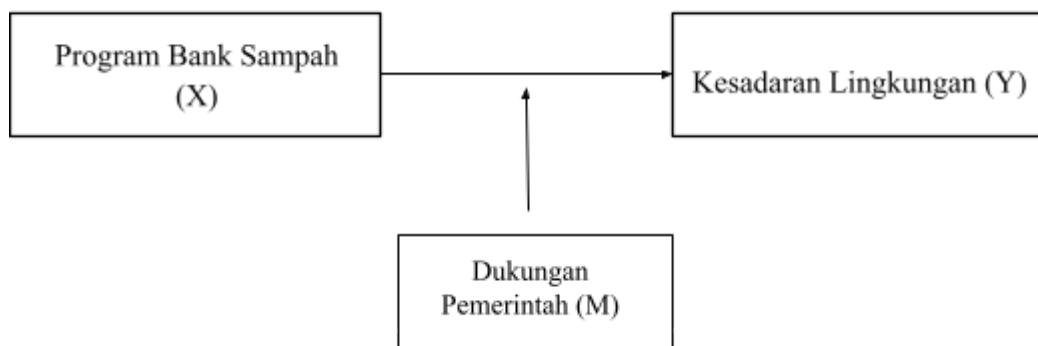
Kesadaran lingkungan mencerminkan tingkat pemahaman dan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan serta mengelola sampah dengan baik. Sementara itu, dukungan pemerintah berperan sebagai faktor moderasi, yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara efektivitas program bank sampah dan kesadaran lingkungan. Dukungan pemerintah dapat berupa regulasi, fasilitas, kebijakan insentif, serta sosialisasi yang mendukung keberlanjutan program bank sampah.

Penelitian ini berusaha mengkaji hubungan antara efektivitas pelaksanaan program bank sampah dengan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan nasabah, serta bagaimana dukungan pemerintah dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Dengan asumsi, apabila program bank sampah berjalan secara efektif dan didukung penuh oleh pemerintah, maka nasabah akan lebih memahami pentingnya memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik, serta lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan.

Sebaliknya, apabila program ini tidak berjalan optimal dan minim dukungan pemerintah, maka kesadaran lingkungan masyarakat kemungkinan tidak akan

mengalami peningkatan yang signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana efektivitas program bank sampah mampu mendorong perubahan kesadaran lingkungan masyarakat, serta apakah dukungan pemerintah dapat memperkuat dampak positif dari program tersebut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori kesadaran lingkungan oleh Geng & He (2021), yang menjelaskan bahwa kesadaran individu terhadap isu-isu lingkungan dapat mempengaruhi penerimaan serta efektivitas suatu kebijakan atau program pengelolaan lingkungan. Kesadaran lingkungan tidak hanya mencerminkan pemahaman seseorang terhadap permasalahan lingkungan, tetapi juga mencakup sikap, niat, dan perilaku dalam menjaga serta melestarikan lingkungan. Dengan menggunakan teori kesadaran lingkungan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas program bank sampah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, serta apakah dukungan pemerintah dapat memperkuat pengaruh efektivitas program terhadap peningkatan kesadaran lingkungan pada nasabah bank sampah.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Terdapat pengaruh positif antara efektivitas program bank sampah terhadap kesadaran lingkungan nasabah bank sampah di Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya.
- H2: Dukungan pemerintah memoderasi pengaruh program bank sampah terhadap kesadaran lingkungan nasabah bank sampah di Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya.
- H3: Semakin tinggi dukungan pemerintah, semakin kuat pengaruh positif program bank sampah terhadap kesadaran lingkungan nasabah bank sampah di Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya.

Hipotesis penelitian ini mengusulkan bahwa program bank sampah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan nasabah, serta bahwa dukungan pemerintah dapat memoderasi pengaruh tersebut. Hipotesis ini berangkat dari asumsi bahwa program yang dijalankan secara efektif akan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Efektivitas program ini diukur dari aspek pemahaman nasabah mengenai tujuan program, partisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah, manfaat ekonomi yang dirasakan, dan komitmen untuk terus mengikuti program. Semakin tinggi tingkat efektivitas program bank sampah, diharapkan nasabah akan

memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran mereka dalam menjaga lingkungan.

Pada hipotesis pertama (H1) menyatakan adanya pengaruh positif antara program bank sampah dengan kesadaran lingkungan nasabah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat efektivitas program bank sampah, maka semakin meningkat pula kesadaran lingkungan nasabah. Kesadaran ini diukur melalui perilaku seperti pemilahan sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan keterlibatan dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Hipotesis ini difokuskan untuk menguji sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program bank sampah dapat mendorong perubahan kesadaran lingkungan masyarakat.

Hipotesis kedua (H2) difokuskan untuk menyoroti peran moderasi dukungan pemerintah dalam hubungan antara program bank sampah dan kesadaran lingkungan nasabah. Dukungan pemerintah, yang dapat berupa kebijakan, fasilitas, dan sosialisasi yang intensif, diharapkan dapat memperkuat dampak program bank sampah. Dengan adanya dukungan yang memadai, nasabah akan mendapatkan informasi yang lebih jelas, insentif yang lebih menarik, serta dukungan struktural yang memungkinkan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, hipotesis ini menguji apakah perbedaan tingkat dukungan pemerintah dapat mengubah atau memoderasi pengaruh program bank sampah terhadap peningkatan kesadaran lingkungan.

Hipotesis ketiga (H3), Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat dukungan pemerintah, semakin kuat pula pengaruh positif program bank

sampah terhadap kesadaran lingkungan nasabah. Dengan dukungan pemerintah yang optimal, diharapkan program bank sampah dapat menghasilkan perubahan perilaku yang lebih signifikan, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta menurunkan volume sampah yang berakhir di TPA. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menguji tiga hipotesis yang saling berkaitan. Pengujian hipotesis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan peningkatan kesadaran lingkungan.